

HALAMAN JUDUL	i
INTISARI	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5 <i>Literature Review</i>	11
1.6 Kebaruan Penelitian	20
BAB II KERANGKA TEORI	25
2.1 Mineral Batubara dan Potensi Pertambangan di Indonesia	29
2.1.1 Batubara di Indonesia	31
2.1.2 Potensi Tambang dalam Batubara di Indonesia	32
2.1.3 Wilayah Potensi Pertambangan Batubara	33
2.2 Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development Goals (SDGs), & Batubara	35

2.2.1 MDGs dan SGDS.....	35
2.2.2 Pembangunan dan SDGs.....	37
2.2.3 Batubara, MDGs dan SDGs	38
2.3 Teori <i>Rent-seeking</i>	45
2.4 Teori <i>Elites</i> pada Masyarakat <i>Patron-Client</i>	55
2.4.1 Teori <i>Elites</i> Laswell-Mills-Schumpeter dan Kritik Atasny.....	56
2.4.2 Pemodelan <i>Patron-Client</i> dan Kebijakan dalam <i>Rent-Seeking Society</i> ...	66
2.4.3 Klientelisme dalam Hubungan <i>Patron Client</i> dan <i>Rent-Seeking</i>	72
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	74
BAB III METODE PENELITIAN	79
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	79
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian	85
3.3 Definisi Konsep dan Operasional Penelitian	88
3.4 Tipe dan Teknik Pengumpulan Data	94
3.5 Teknik Analisis Data	99
3.6 Instrumen Penelitian	100
3.7 Struktur dan Sistematika Penulisan	103
BAB IV ARENA <i>RENT-SEEKING</i> PERTAMBANGAN BATU BARA: ASPEK HISTORIS, POLITISASI, DAN DINAMIKA KEBIJAKAN	106
4.1 Pertambangan Batubara Masa Kolonial hingga Pasca Reformasi.....	106
4.2 Sejarah Izin Tambang Baru Berujung pada Masalah	115
4.3 Gambaran Kerugian Sosial Pertambangan Batu Bara	122
4.4.1 Gambaran Kerugian Kurang Bayar Royalti: Manipulasi Data <i>Surveyor</i> .	123
4.4.2 Gambaran Kerugian Menggeser Tata Batas Kehutanan.....	125
4.4.3 Gambaran Kerugian Nilai Publik : Hak Angket DPRD Kota D Tahun 2010	126

4.4.4	Gambaran Hilangnya Kawal dan Imbang Daerah terhadap Produksi Batubara.....	128
4.4.5	Gambaran Kerugian Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan .	129
BAB V PRAKTIK <i>RENT-SEEKING</i> PERTAMBANGAN BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: LIMA KASUS UTAMA		
5.1	Praktik <i>Rent-Seeking</i> 7 IUP Baru Milik Bapak ROT.....	135
5.1.1	IUP Baru ROT: Kompensasi Dana Penyelesaian Kasus	136
5.1.2	Cara <i>Rent-seeking</i> Bekerja melalui Regulasi	151
5.2	Praktik <i>Rent-seeking</i> Blok Baru PKP2B Gunung Tajus.....	159
5.2.1	<i>Clear and Clean</i> sebagai Instrumen Nama dan Status Baru Blok Gunung Tajus.....	161
5.2.2	Indikator <i>Rent-seeking</i> dalam Kasus PKP2B Gunung Tajus	171
5.3	Praktik <i>Rent-seeking</i> Manipulasi Data Ekspor Pertambangan <i>Surveyor</i>	176
5.3.1	Metode <i>Self Assesment Surveyor</i> : Sumber Masalah	178
5.3.2	Manipulasi Data Ekspor: <i>Mark up</i> dan <i>Mark down</i> Tanpa Kawal dan Imbang	194
5.4	Praktik <i>Rent-seeking</i> Sertifikasi <i>Clear and Clean</i>	201
5.4.1	Menyoal Sertifikasi <i>Clear and Clean</i> : Tanpa Tinjauan Lapangan	202
5.4.2	Sertifikasi <i>Clear and Clean</i> : Arena <i>Rent-Seeking</i> Baru.....	210
5.5	Bisnis Politik IUP Batubara dan Politik Lokal	215
5.5.1	Bisnis Politik IUP: Biaya Boneka Politik Pilkada Kota D Tahun 2015.	215
5.5.2	Memanfaatkan Celah Regulasi dan Membonceng Target Pendapatan Asli Daerah.....	228
BAB VI PELAKU DAN REGULASI DALAM POLA DAN PRAKTIK <i>RENT-SEEKING</i>: ORANG KETIGA DAN DINAMIKA BIROKRASI.....		
6.1	Fenomena “TIGA P” Perizinan Tambang Batubara	234
6.1.1	Akses Kebijakan dengan Menggunakan Perantara	237
6.1.2	Perempuan dalam “3P” sebagai Instrumen Aktivitas <i>Rent-seeking</i>	242

6.1.3 Paranormal sebagai Pintu Masuk Jaringan <i>Rent-seeking</i>	246
6.2 Kontestasi Penguasa-Pengusaha sebagai Dominasi Peran <i>Elites</i>	249
6.2.1 Pengusaha Mempengaruhi Penguasa dalam Menciptakan <i>Rents</i>	251
6.2.2 Penguasa Mendominasi dan Mengambil Inisiatif Menciptakan <i>Rents</i> ..	257
6.3 Birokrat dalam Lingkaran Praktik <i>Rent-seeking</i>	265
6.3.1 Pemerintah Pusat dan Daerah: Bekerjasama, Bersaing, Berkonflik	269
6.3.2 Inisiatif Pemerintah Melembagakan Pihak Ketiga dan Menciptakan <i>Rent-Seeking</i>	274
6.3.3 Pemerintah Menciptakan <i>Rent-Seeking</i> melalui Politik Lokal.....	278
6.4 Korupsi Politik dalam Mekanisme <i>Rent-Seeking</i>	281
6.4.1 Strategi Patronase dan Korupsi Politik	282
6.4.2 Korupsi melalui <i>Deal</i> dengan Partai Politik.....	285
BAB VII ANALISIS JARINGAN MAFIA <i>RENT-SEEKING</i> PERIZINAN ...	291
7.1 Jaringan <i>Rent-Seeking</i> Perizinan Pemerintah Daerah	294
7.2 Jaringan Mafia <i>Rent-Seeking</i> Perizinan Provinsi	299
7.3 Jaringan <i>Rent-Seeking</i> Perizinan Kementerian Kehutanan.....	303
7.4 Jaringan <i>Rent-Seeking</i> Perizinan Kementerian ESDM	308
7.5 Jaringan <i>Rent-Seeking</i> Lembaga <i>Surveyor</i>	313
7.6 Jaringan <i>Rent-Seeking</i> Bisnis Politik IUP Daerah	317
7.7 Ciri Khas Jaringan Mafia <i>Rent-Seeking</i> Perizinan Pertambangan Batubara ...	321
7.8 Temuan Ikatan <i>Patron Client</i> Jaringan Mafia <i>Rent-Seeking</i> dan Pola Hubungan	322
BAB VIII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	325
8.1 Aktor dan Pola Hubungan Aktor <i>Rent-Seeking</i>	326
8.1.1 Peran Aktor “Tiga P” dalam Perizinan Pertambangan Batu Bara	328
8.1.2 Kontestasi Penguasa-Pengusaha dalam Dominasi Peran Elite	328
8.2 Jaringan Mafia <i>Rent-Seeking</i> Perizinan	331



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KAJIAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATU BARA: Studi Kasus Analisis Peran Aktor dan Pola Rent-Seeking dalam Kontestasi Kebijakan Perizinan Pertambangan Batu Bara Tahun 2009-2014 di Provinsi Kalimantan Timur

BAMBANG ARWANTO, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

8.3 Implikasi Kebijakan	334
8.3.1 Implikasi Teoritis	335
8.3.2 Implikasi Praktis	338
8.4 Saran Rekomendasi Kebijakan	343
8.5 Kontribusi Akademik	347
8.6 Kelemahan Penelitian	350
8.7 Rekomendasi Penelitian Lebih Lanjut	350
DAFTAR PUSTAKA	351
LAMPIRAN	364